



Press Release

INDUSTRI GANJA MEDIS UNTUK PENGENTASAN PEREDARAN GELAP

Jakarta, 26 Juni 2021 - 26 Juni kerap disederhanakan menjadi Hari Anti Narkotika Internasional. Padahal secara resmi, 26 Juni seharusnya dimaknai sebagai Hari Anti Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika Internasional. Dan di 26 Juni kali ini, Yayasan Sativa Nusantara ingin menyerukan pentingnya percepatan perubahan kebijakan untuk mengakomodir hadirnya ganja medis di Indonesia.

Ketiadaan kebijakan ini telah memakan banyak korban: Alm. Yeni Riawati, Alm. Musa Ibn Pedersen, Fidelis Arie Sudarwoto, Reyndhard Rossy, dan banyak kasus lain yang tidak terpantau media dan mata masyarakat. Penting untuk diingat, bahwa kasus-kasus di atas juga terjadi karena ketiadaan jalur resmi untuk mengakses ganja medis yang membuat mereka entah harus memproduksinya sendiri, membeli di pasar gelap, atau menghentikan pengobatan. Maka dari itu, berkaitan dengan 26 Juni kali ini, salah satu cara untuk mengentaskan peredaran gelap di sektor ini justru adalah dengan menjamin adanya akses jelas yang teregulasi dan diawasi penuh oleh negara.

Menariknya, Indonesia saat ini tengah dikelilingi oleh berbagai pihak yang punya ketertarikan soal ini. Beberapa perusahaan konsultan ganja dari Eropa dan Amerika Utara mendirikan kantor di Tiongkok dan Thailand. Hal ini menunjukkan adanya ketertarikan pada potensi Asia Pasifik, termasuk Indonesia tentunya, baik sebagai pasar maupun produsen.

Maka, langkah Indonesia dalam beberapa tahun ini akan sangat penting. Apakah Indonesia akan berubah dengan lebih cepat agar ia bisa sangat terlibat dalam ekonomi ini? Atau Pemerintah hanya akan menunggu terlalu lama, dan ketika kebijakan berubah, Indonesia hanya akan menjadi pasar belaka?

Skema legal juga akan memastikan semua pihak dapat bersaing dengan lebih sehat, dapat meminta pertanggungjawaban perusahaan dengan lebih jelas (misalnya jika ada pelanggaran di bidang lingkungan atau pemanfaatan buruh anak), meminimalisir korupsi, dan jelas membuka banyak lapangan kerja. Kecuali Indonesia nanti memilih proteksionisme, penting agar investasi dari luar juga diregulasi dengan baik: dari sisi besaran, jalur masuk, alih teknologi dan pengetahuan, dan seterusnya.

Di antara keuangan nasional yang minus (-0,74 persen - BPS, 5 Mei 2021), angka pengangguran yang tinggi karena COVID-19 (9,7 juta orang - Kemnaker, 10 Maret 2021), akses kebutuhan kesehatan masyarakat, 3,6 triliun rupiah potensi industri farmasi berbasis ganja di Thailand pada 2025, serta puluhan ribu orang yang terus ditangkap karena ganja setiap tahunnya, sudah sepatutnya Pemerintah mengambil langkah untuk berubah. Kontribusi industri ini pada ekonomi Indonesia tentu diharapkan dapat membantu Pemerintah yang nampaknya dalam keadaan yang pelik akhir-akhir ini - hingga harus mengeluarkan rencana menaikkan PPN.

Banyak cara. Pemerintah dan Parlemen dapat mendukung upaya masyarakat sipil di Mahkamah Konstitusi saat ini. Parlemen juga dapat menyeriusi upaya revisi UU Narkotika dan RKUHP di Prolegnas - dengan adanya dekriminalisasi, misalnya. Kementerian Kesehatan juga dapat menurunkan ganja ke Golongan III Narkotika - yang membuatnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan medis.

Yang jelas, butuh komitmen politik. Ini bisa jadi warisan kebijakan Presiden Joko Widodo yang paling luar biasa baik di level nasional dan internasional, mengingat posisi Indonesia yang strategis di Southern Hemisphere dan negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim.



Perubahan kebijakan semacam ini akan membuat masyarakat mengenang Budi Gunadi sebagai Menkes yang berani dan inovatif serta, tentu saja, Jenderal Listyo Sigit (Kapolri) dan Komjen Petrus Golose (Kepala BNN) sebagai penegak hukum yang berpikiran terbuka, progresif, dan merayakan kemajuan sains dan teknologi.

Oleh karena itu, kami menyambut dengan gembira kabar pertemuan Kementerian Luar Negeri dan Badan Narkotika Nasional pada esok hari (25 Juni 2021) untuk membahas sosialisasi perubahan penggolongan ganja dan resin ganja sebagaimana diputuskan oleh Komisi Narkotika PBB (UN CND) pada akhir 2020 lalu. Kami berharap dengan turut diundangnya Kementerian Kesehatan pada acara ini dapat membuat penggolongan tanaman ganja dan segala zat dan bentuk turunannya dapat memenuhi hak masyarakat atas kesehatan. Wewenang pemindahan golongan sesungguhnya sepenuhnya ada di tangan Kemenkes dan kami harap kementerian dan lembaga negara lainnya akan membantu Kemenkes untuk mengeksekusi kewenangan ini - bukan justru menghalang-halangi.

Semoga di 26 Juni kali ini Indonesia benar-benar ingin mencoba mengatasi peredaran gelap - bukan hanya dengan meneriakkan slogan-slogan, tapi dengan pembaharuan.

Kontak:

Yohan Misero

Direktur Hukum dan Kebijakan YSN

085697545166
